



RENCANA KERJA TAHUN 2026



**Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3D07CFEC87>

3D07CFEC87

KATA PENGANTAR

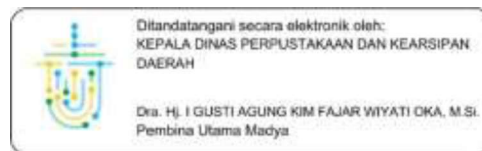
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 telah selesai disusun.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 berpedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2026 mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal dan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Guna menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tersebut.

Demikian, semoga dokumen Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 ini dapat menghasilkan Perencanaan yang implementatif, akuntabel dan berorientasi kinerja untuk mendukung terwujudnya Jawa Barat Istimewa Lembur diurus Kota ditata.

Bandung, 01 Juli 2025
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



3D07CFEC87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3D07CFEC87>

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	2
1.3 Maksud dan tujuan.....	3
1.4 Sistematika penulisan	4
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dispusipda Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat	13
2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2026.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
Bab III : Tujuan dan Sasaran Dispusipda	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispusipda Tahun 2026	24
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026	24
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan	36
Bab V : Penutup	45



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3D07CFEC87>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan budaya literasi dan pengelolaan arsip yang modern. Di tengah percepatan transformasi digital dan perubahan sosial yang dinamis, peningkatan literasi masyarakat menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan era informasi. Oleh sebab itu, upaya memperkuat budaya literasi di Jawa Barat tidak hanya menjadi program pembinaan pengetahuan, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan karakter dan daya saing masyarakat.

Selain itu, pengelolaan arsip di era digital menuntut implementasi teknologi informasi yang canggih dan pengawasan kearsipan internal yang ketat agar dokumen dan informasi penting daerah dapat terjaga keotentikannya serta mudah diakses. Digitalisasi arsip menjadi langkah strategis dalam mendukung efisiensi pelayanan dan transparansi pemerintahan, sekaligus menjawab kebutuhan administrasi yang semakin kompleks.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat sinergi antara pengembangan budaya literasi masyarakat dan modernisasi kearsipan. Kebijakan ini selaras dengan arahan nasional, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang menekankan pentingnya penguatan literasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjadi landasan hukum yang mengarahkan pelaksanaan program-program strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029 yang terpilih, mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti tertuang secara rinci pada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas unit, dan Tata Kerja



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan tetap memperhatikan input dari berbagai pihak demi kemajuan bersama. Melalui rencana kerja ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat berkomitmen untuk mendorong budaya literasi yang merata sekaligus mengoptimalkan digitalisasi dan pengawasan arsip internal, demi terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang melek informasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renja;
6. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2026;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

